

Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung Jaya Makmur Distrik Kurik

Arika Dewi Fatmawati¹, Aenal Fuad Adam²

*1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus,
Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 9961, Indonesia*

Email: arikadewi091@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2025

Revision: 10-08-2025

Accepted: 17-08-2025

Published: 20-08-2025



Abstract

This study aims to describe the causes of low participation of women in the development of the Jaya Makur Village. This research was conducted for approximately 3 months at the Jaya Makur Village Office, Kurik District, Merauke Regency.

The method used in this study was descriptive qualitative with data analysis techniques using sources according to Denzin and Lincoln, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The number of informants in this study was 11 people.

The study's results regarding women's participation in the development planning of the Jaya Makur Village in the Kurik District are still not optimal. Participation in ideas has been quite open, with the village government providing space for women to express ideas in village forums. Participation in property where women's involvement is still minimal and dominated by men's groups reflects the gap in implementing village programs. Participation in skills and expertise is not yet fully strategic because it focuses on social roles such as in the Postu (village leadership post) or the Family Welfare Movement (PKK). Structural barriers such as domestic responsibilities, minimal family support, and cultural norms limit women in Jaya Makmur village from developing the technical skills needed to participate actively in planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui apa penyebab rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan kampung jaya makmur. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, lokasi penelitian di Kantor Kampung jaya makmur Distrik kurik Kabupaten Merauke.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan sumber menurut Denzin dan Lincoln yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang.

Hasil dari penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung jaya makmur Distrik kurik masih belum optimal. partisipasi buah pikiran dimana pemerintah kampung telah cukup terbuka dengan memberi ruang terhadap perempuan untuk menyampaikan ide pada forum-forum di kampung. partisipasi harta benda dimana keterlibatan perempuan masih minim dan didominasi oleh kelompok laki-laki yang dicerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi program kampung. partisipasi keterampilan dan

Keywords:

*Participation Of Ideas,
Participation Of Assets,
Participation Of Labor, Skills
And Expertise*

Kata Kunci:

*Partisipasi Buah
Pikiran,
Partisipasi
Harta Benda,
Partisipasi
Tenaga,
Keterampilan
Dan Kemahiran*

kemahiran dimana belum sepenuhnya strategis karena masih terfokus pada peran-peran sosial seperti di Postu atau PKK. Hambatan struktural seperti tanggung jawab domestik, minimnya dukungan keluarga, dan norma budaya membatasi perempuan kampung Jaya Makmur dalam mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam perencanaan

1. Pengantar

Partisipasi merupakan keterlibatan dan keikutsertaan yang keduanya mengandung kesamaan meski memiliki penekanan arti yang berbeda. Menurut Narayan dalam (Eko, 2003) Keterlibatan terkait siapa saja yang terlibat sedangkan keikutsertaan terkait bagaimana masyarakat terlibat. Partisipasi oleh masyarakat dapat diartikan pula sebagai bentuk pencapaian dari kelompok masyarakat dalam level yang lebih tinggi (masyarakat madani) Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dukungan secara mutlak tersebut bukan hanya sekedar dalam rangka pelaksanaan program tetapi juga dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik sebagai proses evaluasi setelah program pemerintah tersebut selesai dijalankan. Keadaan ini memposisikan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting dalam proses pembangunan pemerintahan. (Dwinugraha, 2019)

Kegiatan membangun masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan masyarakat karena disamping memerangi kemiskinan dan kesenjangan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan inisiatif. Pendekatan pemberdayaan ini cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas (bottom-up). *Bottom up* berarti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dari bawah, kemudian diakomodasi oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini dinas-dinas terkait, untuk dimasukkan sebagai mata program dalam perencanaan pembangunan. (Melalui et al., 2013)

perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kampung Jaya Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke adalah isu penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam masyarakat Papua, termasuk Kabupaten Merauke, perempuan sering kali berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pertanian, perdagangan, dan kerajinan, yang menjadi tulang punggung ekonomi kampung. Namun, partisipasi perempuan dalam pembangunan formal sering kali diabaikan atau kurang dihargai, terutama dalam pengambilan keputusan tingkat desa atau kampung.

Di Kampung Jaya Makmur, potensi perempuan dalam pembangunan sangat besar, terutama di sektor pertanian dan ekonomi rumah tangga. Sebagai kampung yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perempuan memainkan peran kunci dalam memastikan keberlangsungan pangan keluarga dan kontribusi terhadap ekonomi kampung. Mereka sering terlibat dalam kegiatan menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Meski demikian, keterlibatan mereka di sektor ini sering kali tidak diakui sebagai kontribusi formal dalam pembangunan desa, dan mereka jarang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang lebih luas.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023 jumlah penduduk Distrik Kurik sebanyak 16.853 orang dengan luas

wilayah yang mencapai hingga 760,73 km², sehingga kepadatan penduduk di Distrik Kurik sebesar 22,15 orang/km², dengan penduduk laki - laki 8.734 jiwa dan 8.119 jiwa penduduk perempuan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Distrik Kurik sebesar 107,57. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan (District & Figures, 2024).

Dengan jumlah penduduk yang hampir banyak kampung jaya makmur memiliki jumlah penduduk 1.562 jiwa orang dengan terdiri dari perempuan yang berjumlah 810 jiwa orang dan jumlah laki laki 752 jiwa orang sehingga dengan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki laki perlu adanya peran partisipasinya dalam pembangunan kampung jaya makmur.

Selain sektor ekonomi, perempuan juga memiliki peran penting dalam sektor sosial. Mereka sering berperan sebagai penjaga tradisi dan budaya, serta sebagai penghubung antaranggota masyarakat dalam kegiatan sosial dan adat. Di Kampung Jaya Makmur, perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan adat yang memperkuat kohesi sosial, serta dalam kegiatan keagamaan yang menjadi bagian integral dari kehidupan kampung. Keterlibatan ini memberi mereka posisi strategis dalam masyarakat, meski belum sepenuhnya tercermin dalam partisipasi mereka di ruang-ruang formal pengambilan keputusan.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih aktif dalam pembangunan kampung. Melalui program-program pemberdayaan dan pelatihan, perempuan di Kampung Jaya Makmur bisa lebih dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Program seperti pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, pelibatan mereka dalam musyawarah kampung, serta pembentukan kelompok usaha berbasis perempuan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa. UU ini membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), serta dalam pengelolaan Dana Desa. Di Kampung Jaya Makmur, pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan untuk program-program pemberdayaan perempuan dapat membantu mengangkat posisi perempuan dalam pembangunan, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan sosial.

Perempuan sering tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa karena adanya norma sosial patriarkal, stereotip gender, kurangnya representasi perempuan dalam kepemimpinan, serta kurangnya akses perempuan terhadap informasi dan sumber daya untuk berpartisipasi aktif sehingga dari sudut pandang tersebut perempuan dianggap kurang dalam ikut serta pembangunan kampung sedangkan masih banyak segi pembangunan kampung yang tidak memerlukan tenaga dan sudut pandang fisik.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan kampung. Salah satu tantangan utamanya adalah masih kuatnya norma budaya yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menganggap pengambilan keputusan sebagai wilayah laki-laki. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan di Kampung Jaya Makmur relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses-proses formal seperti musyawarah pembangunan kampung.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah kampung, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat setempat. Pelibatan tokoh adat dalam mendukung partisipasi perempuan sangat penting, mengingat mereka memiliki

pengaruh kuat dalam masyarakat. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan, terutama di bidang ekonomi dan kepemimpinan, akan menjadi langkah strategis dalam mendorong peran perempuan dalam pembangunan kampung.

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga dapat menjadi pendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Di Kampung Jaya Makmur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perempuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah kampung berupa modal usaha dan pelatihan kewirausahaan, perempuan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi kampung.

Penting juga bagi pemerintah kampung untuk mendorong terbentuknya kelompok-kelompok perempuan yang fokus pada kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti kelompok tani perempuan atau koperasi perempuan. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pembangunan kampung.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Inawati (2015:6) menjelaskan bahwa PKK merupakan wadah masyarakat terutama didesa yang berisi beragam aktivitas bermanfaat yang terdiri dari kegiatan keterampilan, kesehatan, pendidikan keluarga yang dimulai dari terbawah rumah tangga (RT) dan kegiatan bermanfaat lainnya. Organisasi PKK ada baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa, maka PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu mengajak keikutsertaan masyarakat terutama didesa untuk pembangunan serta pertumbuhan didesa, dimana yang berperan menjalankan ialah perempuan, guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat (Herlina, 2019).

PKK menurut Jovani (2016:154) menyatakan bahwa “PKK melaksanakan program keaksaraan fungsional, pelatihan yang dilakukan untuk membuat kerajinan tangan, produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka serta dapat berpartisipasi mewujudkan pembangunan nasional.

Melalui program-program PKK Kampung Jaya Makmur dibidang kesehatan yaitu posyandu lansia yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali peran perempuan sangat diandalkan dalam program ini, Namun berdasarkan observasi awal pelaksanaan program tersebut belum mencapai keberhasilan dikarenakan partisipasi perempuan dan kurangnya sumberdaya tenaga medis sehingga harapan untuk dilaksanakan setiap per-minggu sekali kini pelaksanaan program tersebut hanya sebulan sekali, perlu ada perhatian untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama bidang terkait untuk mningkatkan program tersebut, sehingga dari program ini bisa menjadikan proses pembangunan kampung lebih maju.

Dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, diharapkan Kampung Jaya Makmur dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peran perempuan yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan akan membawa dampak positif tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi kemajuan kampung secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk Perempuan dan Partisipasinya dalam pembangunan kampung jaya makmur Distrik kurik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas, relevansi, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta memberikan rekomendasi untuk Mendeskripsikan apa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung

Pendahuluan harus menjelaskan poin-poin utama berikut ini: Latar belakang masalah. Keadaan terkini. Eksplorasi literatur sebelumnya tentang subjek yang sama dengan teks yang sedang ditulis. Analisis kesenjangan. Pentingnya atau keunikan mengapa penelitian ini ditulis, atau upaya untuk mengisi kesenjangan/keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian. (Maksimal 1 paragraf, bisa langsung ditekankan di paragraf pertama Pendahuluan) Kerangka teori. Beberapa kerangka teori yang digunakan, juga harus digunakan pada saat pembahasan. Jika terdapat banyak kerangka teori, maka Anda dapat membuat sub-bab sendiri yang ditulis bersamaan dengan metode.

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

2.1 Konsep Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan status antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis dan permanen, gender bersifat dinamis, dapat dipertukarkan, dan dipengaruhi oleh nilai budaya serta perkembangan zaman (Abdullah, 2004). Gender sering disalahpahami sebagai sinonim dari perempuan, padahal mencakup relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara historis dan kultural (Goleman et al., 2019).

Kesetaraan gender mencerminkan persamaan hak dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan keadilan gender menekankan perlakuan yang adil terhadap peran dan tanggung jawab tanpa diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan (Falabiba, 2019).

2.2 Konsep Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif dan sukarela individu atau kelompok dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan bersama (Fahrudin, 2011). Partisipasi mencakup kontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, maupun materi, serta tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan (Wahyuni, 2019; Sulaeman et al., 2019). Masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, terlibat dalam setiap tahapan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, hingga pemanfaatan hasil (Hermawan & Rofiq, 2020).

2.3 Bentuk dan Hambatan Partisipasi

Bentuk partisipasi terdiri atas empat kategori: (1) buah pikiran, berupa ide dan gagasan; (2) tenaga, melalui keterlibatan fisik; (3) harta benda, berupa sumbangan materi; dan (4) keterampilan, melalui pemberian keahlian (Huraerah dalam Taufik & Eprilianto, 2022).

Hambatan partisipasi antara lain meliputi:

1. Sifat individu seperti sikap apatis dan egoisme (Dwiningrum);
2. Faktor ekonomi, di mana pendapatan rendah menghambat keikutsertaan;
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan (Warga et al., n.d.).

2.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender. Perempuan seringkali mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar yang luput dari perhatian laki-laki, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Monica & Fauziah, 2017).

Namun, partisipasi perempuan masih menghadapi kendala, antara lain:

1. Waktu, karena tanggung jawab domestik membatasi ruang gerak;
2. Pengetahuan, terkait kurangnya pemahaman terhadap proses perencanaan dan evaluasi;
3. Dana, di mana perempuan kerap menggunakan dana pribadi untuk menunjang kegiatan (Manembu, 2017).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini, menurut Sugiyono (2011: 56) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, yang diwujudkan melalui sumbangan ide, masukan, serta pendapat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurut Umeidini et al. (2019), partisipasi ini dapat diberikan melalui forum-forum masyarakat yang difasilitasi oleh pemimpin lokal seperti Ketua RT, RW, atau Kepala Kampung. Partisipasi jenis ini menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana masyarakat dilibatkan secara intelektual dan ideologis dalam proses pembangunan, bukan hanya secara fisik atau material.

Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti secara khusus partisipasi perempuan dalam memberikan buah pikiran atau masukan terhadap program-program kampung. Wawancara yang dilakukan kepada informan kunci dan penunjang memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai tingkat keterbukaan pemerintah kampung terhadap ide atau pendapat dari kalangan perempuan. Menurut Dwi Oktavia et al. (2024) dalam penelitiannya yang menerangkan bahwa analisis terhadap pelibatan perempuan dalam program pemberdayaan kampung melalui komunitas menemukan bahwa “strategi seperti sosialisasi awal, deliberasi, organisasi, dan review partisipatif” efektif meningkatkan keterlibatan politik dan ide dari perempuan dalam menemukan gagasan atas partisipasi suatu program yang di rencanakan pemerintah kampung.

Berdasarkan hal diatas menurut penulis peran dan partisipasi perempuan menjadi jembatan penunjang dalam memberikan buah pikiran atau masukan terhadap setiap program-program kampung seperti sosialisasi awal, partisipasi dalam kelompok komunitas kampung maupun keikutsertaan perempuan dalam setiap musyawarah kampung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Beberapa informan kunci dari unsur pemerintah kampung, seperti Kepala Kampung (SA), Sekretaris Kampung (D), dan Ketua Bamuskam (S), menyatakan bahwa pemerintah kampung telah cukup terbuka terhadap partisipasi perempuan. Mereka mengakui bahwa perempuan tidak hanya diundang dalam musyawarah kampung, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan ide, terutama terkait isu-isu kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua PKK (R) dan Ketua Pustu (SJ), yang menyatakan bahwa perempuan telah dilibatkan, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Usulan yang datang dari kelompok perempuan pun beberapa sudah direalisasikan, seperti pelatihan menjahit dan kebun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa buah pikiran perempuan tidak hanya didengar tetapi juga mulai diimplementasikan dalam kebijakan dan program kampung.

Meskipun sebagian besar informan kunci menyatakan bahwa pemerintah kampung telah cukup terbuka, hasil wawancara dengan informan penunjang dari kalangan masyarakat mengungkapkan adanya kesenjangan antara niat dan praktik. Beberapa masyarakat perempuan (seperti informan D, I, dan PW) menyatakan bahwa mereka merasa belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif. Mereka

memang diundang dalam musyawarah kampung, tetapi peran yang dimainkan lebih sebagai pendengar, bukan sebagai pengambil keputusan atau pengusul program.

Berdasarkan penelitian oleh Chaidir Ali, (2023) yang menerangkan bahwa Keterlibatan perempuan salah satunya dalam musyawarah desa (Musrenbang) belum cukup jika hanya diundang. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pendapat mereka benar-benar dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Data ini mencerminkan bahwa partisipasi buah pikiran dari perempuan di kampung sudah mulai diakomodasi secara formal, tetapi secara substansial masih memerlukan penguatan. Keterlibatan perempuan belum sepenuhnya setara dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks forum-forum yang didominasi oleh laki-laki. Selain itu, faktor budaya dan rasa percaya diri juga menjadi penghambat bagi perempuan untuk lebih aktif menyampaikan ide mereka.

Sebagaimana hal ini menurut penulis budaya patriarkis hingga kini masih menyebabkan suara perempuan dianggap kurang sah dibandingkan laki-laki. Maka, pelibatan tokoh perempuan sebagai fasilitator dalam forum-forum kampung adalah solusi praktis agar perempuan merasa lebih aman dan terdorong menyampaikan gagasan. Ada juga pengalaman di mana usulan perempuan tidak ditanggapi secara serius atau dianggap kurang penting. Hal ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi yang dibuka secara formal belum sepenuhnya berfungsi secara substantif, terutama dalam memastikan bahwa ide perempuan diproses dan direspon secara adil.

Dalam konteks ini, pemerintah kampung dan lembaga kampung seperti Bamuskam perlu menyediakan ruang yang lebih aman, mendukung, dan terarah bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif. Pelibatan tokoh perempuan dan kader lokal dapat menjadi jembatan penting dalam memperkuat kapasitas perempuan untuk berbicara, berargumen, dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi buah pikiran perempuan dalam pembangunan kampung, pemerintah kampung perlu secara aktif menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan kondusif bagi perempuan, misalnya dengan mengadakan forum khusus perempuan sebelum musyawarah kampung, melibatkan tokoh perempuan sebagai fasilitator, serta memberikan pelatihan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan bagi anggota PKK, kader kesehatan, dan kelompok perempuan lainnya. Selain itu, perlu ada komitmen nyata dari pemerintah kampung untuk menindaklanjuti setiap masukan perempuan secara transparan, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi dalam proses pembangunan.

Partisipasi buah pikiran perempuan dalam pembangunan kampung telah menunjukkan perkembangan positif, namun masih terdapat ruang perbaikan. Pemerintah kampung dinilai cukup terbuka, tetapi perlu meningkatkan kualitas keterbukaan tersebut agar tidak hanya bersifat seremonial. Peningkatan kapasitas perempuan, penguatan peran kelembagaan seperti PKK, serta perubahan budaya musyawarah yang lebih inklusif adalah langkah penting untuk mewujudkan partisipasi yang sejati dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Perempuan.

4.2. Partisipasi harta benda

Berdasarkan konsep partisipasi harta benda menurut Dala et al. (2021), keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi sukarela seperti sumbangan alat, makanan, atau dana menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemberdayaan. Dalam konteks Kampung Jaya Makmur menurut pendapat penulis, kontribusi harta benda dari perempuan Kampung Jaya Makmur sering kali tidak terdokumentasi, misalnya saat mereka menyumbang makanan, tenaga kerja domestik, atau menyumbangkan tempat untuk kegiatan. Ini menyebabkan partisipasi mereka dianggap informal

dan tidak dihitung secara resmi, padahal dampaknya signifikan. Maka, pemerintah kampung seharusnya mencatat partisipasi berbasis gender secara lebih detail agar perempuan tidak hanya menjadi ‘pelengkap’, tetapi mitra setara dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan ekonomi, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sistem pendataan dan verifikasi yang transparan dan partisipatif, melibatkan langsung kelompok perempuan, kader PKK, dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, pendataan, hingga evaluasi program. Pemerintah kampung perlu menetapkan kuota minimal penerima manfaat perempuan, memperkuat kapasitas perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, serta membuka ruang dialog terbuka secara berkala agar perempuan dapat menyuarakan aspirasi dan hambatan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian kampung secara berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan adanya usaha serius dari pihak pemerintah kampung dan lembaga terkait untuk melibatkan perempuan sebagai penerima manfaat langsung dalam program pemberdayaan ekonomi, yang sejalan dengan semangat partisipasi aktif masyarakat. Namun, meskipun beberapa informan kunci dan penunjang menyatakan bahwa perempuan telah cukup terlibat, terdapat juga suara kritis dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa keterlibatan perempuan masih minim dan didominasi oleh kelompok laki-laki atau tokoh tertentu. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi program, khususnya dalam distribusi bantuan dan akses informasi.

Menurut Sri Astutiningsih et al. (2024) dalam penelitiannya menerangkan bahwa pekerjaan di sektor informal yang dilakukan perempuan memberikan manfaat signifikan dalam hal kemandirian finansial dan turut membangun ekonomi rumah tangga. Berdasarkan pendapat penulis, ini menegaskan bahwa kontribusi informal baik tenaga maupun harta benda dalam proses perencanaan, pendataan, hingga evaluasi program dalam kampung berdampak nyata pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hal diatas agar partisipasi harta benda benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan keterlibatan semua pihak, perlu adanya transparansi dalam proses penyaluran bantuan, peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, serta pemberdayaan organisasi perempuan lokal seperti PKK sebagai mitra aktif dalam pendataan, seleksi, dan evaluasi penerima manfaat. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak hanya menjadi simbolik, tetapi menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat kampung secara menyeluruh.

4.3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et al. (2024) melaporkan bahwa seringkali perempuan hanya tampil di kegiatan posyandu atau PKK, belum mengambil peran dalam perencanaan fisik kampung. Secara teknis keahlian seperti pengelolaan anggaran RT/RW, gambar rencana infrastruktur, atau dokumentasi usulan posyandu/pemberdayaan berperan penting dalam menyongsong proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa partisipasi keterampilan perempuan dalam program pelatihan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan waktu karena tanggung jawab rumah tangga, akses transportasi yang sulit, kurangnya dukungan keluarga (terutama suami), rendahnya rasa percaya diri, hingga norma budaya yang masih memposisikan perempuan sebatas peran domestik. Namun, terdapat juga masyarakat yang mendukung dan menilai

pelatihan sebagai peluang peningkatan kesejahteraan.

Menurut Margret anna (2021), salah satu hambatan utama dalam partisipasi teknis perempuan adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan yang relevan. Hambatan tersebut mencakup aspek waktu, mobilitas, dukungan keluarga, dan norma budaya yang menempatkan perempuan pada peran domestik semata. Penelitian oleh Heni Setiawan (2024) juga menegaskan bahwa perempuan di wilayah pedesaan sering tidak memiliki waktu dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengikuti pelatihan keterampilan, terutama jika tidak ada dukungan sosial dari keluarga, khususnya suami.

Menurut pendapat penulis dari penjelasan diatas partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung Jaya Makmur belum sepenuhnya strategis karena masih terfokus pada peran-peran sosial seperti di Postu atau PKK. Hambatan struktural seperti tanggung jawab domestik, minimnya dukungan keluarga, dan norma budaya membatasi perempuan dalam mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam perencanaan. Meski begitu, munculnya pandangan bahwa pelatihan adalah peluang kesejahteraan menunjukkan potensi perubahan. Oleh karena itu, dukungan sistemik diperlukan agar perempuan dapat berperan setara sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan kampung.

Oleh karena itu, perlunya penguatan dengan penyediaan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan guna menjawab hambatan dan mendukung pembangunan kampung salah satunya dengan merancang pelatihan yang fleksibel dari segi waktu dan lokasi, memberikan fasilitas transportasi, serta membangun sistem informasi yang merata. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pelatihan keterampilan, serta menghadirkan pelatihan yang relevan dan langsung aplikatif agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata. Pendekatan berbasis gender yang inklusif dan responsif terhadap kondisi lokal menjadi kunci keberhasilan partisipasi perempuan dalam peningkatan keterampilan.

Solusi untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam kegiatan pelatihan atau peningkatan keterampilan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan yang fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi, seperti mengadakan pelatihan di tempat yang dekat dengan pemukiman dan pada jam-jam yang tidak mengganggu aktivitas rumah tangga. Pemerintah kampung juga perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti transportasi bersama atau penitipan anak selama pelatihan berlangsung. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga, khususnya suami, agar mendukung keterlibatan perempuan dalam pelatihan. Meningkatkan rasa percaya diri perempuan juga penting, bisa dilakukan melalui pelatihan awal berbasis motivasi dan keberdayaan diri. Tak kalah penting, program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi ekonomi yang ada, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan dan memotivasi perempuan untuk terus berpartisipasi.

5. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung Jaya Makmur mengalami permasalahan masing-masing. Pertama, partisipasi buah pikiran dimana pemerintah kampung telah cukup terbuka dengan memberi ruang terhadap perempuan untuk menyampaikan ide pada forum-forum di kampung. Namun belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dan cenderung dianggap hanya sebagai pendengar bukan sebagai pengambil keputusan atau pengusul program di kampung. Hal ini di disebabkan masih adanya budaya patriaki sehingga suara perempuan dianggap kurang sah dibandingkan laki-laki. Kedua,

partisipasi harta benda dimana keterlibatan perempuan masih minim dan didominasi oleh kelompok laki-laki yang dicerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi program kampung, khususnya dalam distribusi bantuan sosial dan ekonomi dan akses informasi yang terbatas di kampung Jaya Makmur. Ketiga, partisipasi keterampilan dan kemahiran dimana belum sepenuhnya strategis karena masih terfokus pada peran-peran sosial seperti di Postu atau PKK. Hambatan struktural seperti tanggung jawab domestik, minimnya dukungan keluarga, dan norma budaya membatasi perempuan kampung Jaya Makmur dalam mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam perencanaan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa pelibatan perempuan masih berada dalam tahap transisi dari simbolik menuju partisipasi yang bermakna dan setara. Sehingga penting dukungan sistemik diperlukan agar perempuan dapat berperan setara sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan kampung.

Referensi

- [1] Caron, J., & Markusen, J. R. (2016).
- [2] Chaidir Ali. (2023). Keterlibatan Perempuan Dalam Musrenbang Tingkat Desa Kota Banda Aceh. *AL-IJTIMA 'I: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 53–82.
- [3] Ch, M. (2012). Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama. *Egalita*, 1–22. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>
- [4] District, K., & Figures, I. N. (2024). *Kecamatan Kurik Dalam Angka 2022 (2). X*.
- [5] Dwi Oktavia -, F. (2024). ANALYSIS OF WOMEN'S PARTICIPATION IN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMS IN THE COASTAL AREAS OF CIREBON CITY. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 62–76.
- [6] Dwinugraha, A. P. (2019). Kaum perempuan dan partisipasinya dalam pemerintahan desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 168–176. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3376>
- [7] Goleman et al., 2019. (2019). Konsep Teori Gender. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [8] Harsono. (2013). Pedoman Puskesmas Pembantu. *Dinas Kesehatan Jawa Timur*, 13–18.
- [9] Herlina, H. (2019). Fungsi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Maasawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 201–212.
- [10] Heni Setiawati, I. F. R. M. S. E. P. (2024). Komunikasi Pembangunan Berbasis Komunitas dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan. *INTERACTION: Communication Studies Journal*, 1(4), 1–20.
- [11] Ii, B. A. B., & Teoritis, T. (2019). *BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Partisipasi 2.1.1.1 Pengertian Partisipasi*. 9–37.
- [12] Manembu, A. E. (2017). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.
- [13] Margret Anna, D. A. D. M. S. H. S. M. N. R. (2021). *Laporan Final Studi: Mengenali Hambatan Multidimensional Perempuan Menjadi Kepala Sekolah dan Madrasah* (1st ed.). Palladium. <http://www.inovasi.or.id>
- [14] Melalui, P., Mandiri, P., Studi, P. (, Di, K., Tanjungkarang, D., Jati, K., Memperoleh Gelar Sarjana, U., Sosiologi, P., Antropologi, D., Anggraeni, O., Lestari, M., & Sosiologi, J. (2013). *PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES Kabupaten Kudus*) *SKRIPSI*.
- [15] Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1314>
- [16] Mursid Purnomo, P. R. T. M. S. (2024). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13752–13763.
- [17] Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Konsep Dasar Gender. *Kesetaraan Gender & Posisinya*, 12–71. [http://repository.uin-suska.ac.id/20488/7/7.2018205TMPI_BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/20488/7/7.2018205TMPI_BAB%20II.pdf)
- [18] NURUL, H. (2020). *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun* <http://repository.umm.ac.id/id/eprint/1441>
- [19] Pramodawardani, C. A. (2013). Peranan Sistem Full Day School dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. *Jurnal Manajemen*, 1–2.
- [20] Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- [21] Sri Astutiningsih, Budiani, S. R., Giyarsih, S. R., & Marwasta, D. (2024). Partisipasi Kerja Perempuan dalam Sektor Informal di Kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dusun Tambakbayan, Kabupaten Sleman,

- DI Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 83–92. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.72652>
- [22] Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Tuti, K. (2018). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu. *Skripsi*, 10–11. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3300>
- [24] Vaughan, C. of. (2017). *No Analisis struktur ko-sebaran indikator terkait kesehatan, pusat rasa sehat subjek, dan lansia yang tinggal di rumah*. (Vol. 14, Issue 1).
- [25] Warga, P., Pembangunan, D., & Press, A. (n.d.). *Rohman, Ainur, Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*, Averroes Press, Malang, 2009 1. 1–10.